

## ANALISIS PENGELOLAAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI JAWA TIMUR

Eni Sri Rahayuningsih

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi - Fakultas Ekonomi Unijoyo

### ABSTRACT

*This research is focuses on the existence "Overseas Contract Workers (OCWs)" that has relations to deportation versus foreign exchange. The research has the following goals : (1) To know and to analyze the influential factors on OCWs policies; (2) To know and to analyze the existence of migrant workers; (3). To know and to analyze government and private company management for migrant worker regarding deportation.*

*This research is the case study with double approaches (qualitative and quantitative). The respondents are selected through purposive sampling with 150 respondents (117 respondents working at abroad and 33 respondents working at this country). Data collection through is done by observation, indepth interview and documentation technique. The respondent investigation is carried out by snowball technique. The research instruments used are check-list and questionnaire. Both qualitative and quantitative methodes are used to analyze are logit model and equilibrium market supported by SCP analyze (structure - conduct-performance).*

*The result indicates that : (1) The influential factors on OCWs decision are : wage factor and knowledge, because of risk probability in the overseas and their family. On other hand, age, education, information, push and pull factor has unreal influence. These conditions are generated from pressures lack of job oppurtunity and hope to prosperity ; (2). The existence of OCWs (legal or illegal) are greatly influenced by supply and demand in the market labour. The implication is that OCWs has contributed foreign exchange. Because of the bargaining power OCWs is lower cause deportation; (3) management of OCWs begins from : recruitment, training, departure and arrival. Government policy should focuses activity on handling the current conditions so that policy must be done, These return illegal OCWs into legal OCWs. Alternative model in the management of OCWs are : (a). reorganize the institution of OCWs, (b) to accommodate OCWs on horizontal integration in the form of association; (c). to manage the information become better than before.*

*Based on the result of the research, it is suggested that : (1). The government must create job, while private institution (PJTki) must change the role of management which not only profit orientation, but also becomes the protection for OCWs and their family; (2) In order to increase bargaining position, OCWs must do horizontal integration by establishing the organization*

**Keyword :** OCWs, management

## PENDAHULUAN

### *Latar belakang*

Situasi ketenagakerjaan di tanah air yang kurang kondusif akibat krisis ekonomi semakin memicu terjadinya migrasi (perpindahan penduduk ke LN untuk bekerja). Negara yang menjadi tujuan dengan gaji yang sangat menjanjikan adalah di negara-negara Arab, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Brunei Darussalam dan sebagainya. Data terakhir Disnaker (2003) menunjukkan bahwa jumlah TKI legal (antara tahun 2000- 2002) telah mencapai 116.141 orang. Padahal, jumlah ini belum termasuk TKI ilegal yang sangat beresiko terhadap terjadinya deportasi juga tidak sedikit jumlahnya.

Sepanjang tahun 2002 sampai awal tahun 2003 telah terjadi krisis hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia terkait permasalahan mengenai TKI ilegal. Pemerintah Malaysia sempat menghentikan permintaan TKI sebagai akibat dari terjadinya kerusuhan yang menyebabkan 15 TKI dipenjara<sup>1</sup>. Permasalahan TKI ilegal di Malaysia ini telah berimbas pada TKI legal. Kepercayaan pemakai jasa TKI (*users*) telah berkurang sehingga berimplikasi negatif terhadap permintaan TKI. Padahal, tantangan persaingan tenaga kerja seperti dari Philipina, Bangladesh dan negara lainnya telah berlangsung.

Kondisi rendahnya kualitas SDM dari TKI benar-benar tidak menguntungkan bagi proses integrasi. TKI yang bekerja di Malaysia rata-rata berpendidikan sangat rendah. Bahkan, ada di antara mereka yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Secara rinci tingkat pendidikan yang ada adalah 8,3 persen tidak pernah sekolah, 16,6 persen tidak tamat sekolah dasar, 32 persen tamat sekolah dasar, 25,7 persen tamat SLTP, 15,7 persen tamat SLTA dan 1,5 persen tamat akademi.<sup>2</sup>

Menghadapi persoalan yang dialami TKI, peran kelembagaan yang ada yakni Pemerintah dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tampaknya belum optimal dalam mengembangkan sistem pengelolaan yang berbasis perlindungan bagi TKI dan anggota keluarganya. Orientasinya masih terkesan pada besarnya devisa atau profit yang akan diperoleh.

Salah satu sebab kegagalan tersebut adalah para pembuat kebijaksanaan, khususnya para perencana tidak memiliki informasi yang spesifik tentang mengapa orang pindah. Dengan kata lain, mereka masih kurang memahami proses pengambilan keputusan untuk bermigrasi. Menurut Keban (1994: 17-18), kebijaksanaan

<sup>1</sup> Kompas2003. *Malaysia Siap Deportasi 50.000 TKI Ilegal*. Kompas (03 - 02 - 2003). di download di [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 15 - 03-2004

<sup>2</sup> Ulasan Rachmat Dwi Susilo, "Persoalan TKI, Persoalan Jawa Timur". Kompas : 4 - Februari - 2002. Jakarta

bermigrasi dapat menjadi lebih efektif, asalkan para pembuat kebijakan memahami proses pengambilan keputusan bermigrasi pada masing-masing keluarga.

Realitas telah menunjukkan bahwa eksistensi TKI ibarat pisau bermata dua. TKI berpotensi mendatangkan devisa, tercatat data dari Disnaker (2003) menunjukkan remitan dari Malaysia periode 2000-2002 sebesar 117.910.800 US \$. Namun di sisi lain, TKI justru mendatangkan banyak masalah terkait dengan adanya deportasi. Mengingat begitu besarnya jumlah TKI yang di deportasi oleh Pemerintah Malaysia, penelitian ini diharapkan dapat mengupas upaya dalam pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

#### *Permasalahan*

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan TKI bekerja di LN ? Bagaimana eksistensi dari TKI dan implikasinya bagi proses pembangunan di Jawa Timur ?

Manajemen apakah yang dilakukan Pemerintah dan Swasta (PJTKI) dalam pengelolaan TKI terkait adanya deportasi TKI ?

#### *Tujuan Penelitian*

Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan TKI bekerja di LN

Menganalisis eksistensi dari TKI sehingga dapat diketahui implikasi baik yang bersifat positif maupun negatif bagi proses pembangunan di Jawa Timur

Menganalisis pengelolaan TKI, baik yang dilakukan pemerintah maupun PJTKI terkait adanya deportasi TKI.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### *Tinjauan Teoritis Migrasi*

Keputusan seseorang melakukan mobilitas dalam bentuk migrasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan atau aspirasi penduduk/individu yang berasal dari daerah tersebut sehingga menjadi tekanan bagi individu. Tekanan ini dibagi dua macam, yaitu tekanan ekonomi dan non ekonomi. Tekanan ekonomi umumnya berupa rendahnya pendapatan di daerah asal akibat semakin sempitnya lahan pertanian, semakin sempitnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Sedangkan tekanan non ekonomi berasal dari aspek sosial psikologi seperti adanya bencana alam di daerah asal, latar belakang pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan di daerah asal (Akmadi, 1994: 17-18).

Teori dorong tarik (*push pull theory*) menurut Lee (1987: 5) adalah bahwa di daerah asal maupun daerah tujuan ada faktor-faktor positif (+), negatif (-) dan netral (0), artinya dalam setiap daerah banyak sekali yang mempengaruhi orang menetap di daerah tujuan, serta ada pula faktor-faktor lain yang memaksa mereka meninggalkan daerah tujuan dan ada pula faktor-faktor yang tidak berpengaruh sama sekali pada penduduknya. Persoalannya, di antara daerah asal dan tujuan ada sejumlah rintangan yang perlu diatasi, seperti ongkos yang harus dikeluarkan.

### *Tinjauan Ketenagakerjaan*

Keseimbangan di pasar tenaga kerja terjadi bila permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja (Insukindro, 1985: 112-113), yakni :

$$N_D = N_S$$

$$N_D (W/P_d) = N_S (W/P_d \cdot P_d/P^*_d)$$

Dari persamaan ini, dapat diketahui besarnya tingkat upah nominal yang akan menyamakan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nilai keseimbangan dari tingkat upah nominal dan jumlah tenaga kerja merupakan fungsi dari  $P_d$ ,  $P^*_M$  dan  $P^*_d$ , yang dengan menggunakan persamaan simultan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$W = W (P_d, P^*_d) = W (P_d, \alpha P^*_d + \beta P^*_M) \dots \dots \dots (2.5)$$

$$N = N (P_d, P^*_d) = N (P_d, \alpha P^*_d + \beta P^*_M) \dots \dots \dots (2.6)$$

Tiga pelaku yang terlibat dalam kegiatan tata niaga baik barang maupun jasa, meliputi : produsen, pedagang perantara, dan konsumen akhir. Produsen (dalam hal ini TKI) adalah pelaku tata niaga yang tugas utamanya menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Perantara (dalam hal PJTKI) adalah pelaku tata niaga yang menyampaikan jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen akhir, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Konsumen akhir (dalam hal ini perusahaan dan rumah tangga) adalah pengguna jasa yang dihasilkan oleh produsen.

Fungsi dari penawaran mempunyai slope positif, artinya : semakin tinggi harga jual maka jumlah output yang dijual akan semakin banyak, atau sebaliknya. Semakin banyak jumlah output yang dijual, peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi semakin besar. Alasannya, semakin banyak jumlah output yang dijual, selain semakin kuat posisi tawar dalam penentuan harga, juga akan menekan biaya tata niaga per unit. Semakin efisien biaya tata niaga, semakin besar peluang penjual mendekati konsumen akhir.

Sebaliknya, fungsi dari permintaan mempunyai slope negatif, artinya : semakin tinggi harga beli maka jumlah output yang dibeli juga akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah output yang dibeli semakin banyak maka semakin besar peluang pembeli untuk

mendapatkan harga beli yang lebih rendah. Semakin banyak jumlah output yang akan dibeli, selain semakin kuat posisi tawar dalam penentuan harga, juga akan menekan biaya tata niaga per unit. Buse dan Brandow, (1960) dalam penelitian Ningsih (2000: 27) menyatakan bahwa semakin efisien biaya tata niaga, maka semakin besar peluang konsumen untuk mendekati produsen.

Indonesia di era globalisasi ini dihadapkan pada kendala eksternal dan internal. Secara eksternal adalah problem daya saing menghadapi pasar bebas, sedangkan kendala internalnya adalah munculnya krisis ekonomi yang berdampak membengkaknya pengangguran dan kemiskinan. Bagi Indonesia, ketenagakerjaan menjadi fenomena yang unik dan menunjukkan karakteristik tersendiri. Meskipun sebenarnya secara kuantitas, bangsa Indonesia dapat berbangga mengingat jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang (Swasono, 1999: 4).

Nawawi (1998: 38-40) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Dalam rumusan lain, manajemen SDM diartikan sebagai pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja (*employer-employee*), terutama untuk menciptakan pemanfaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha mencapai tujuan organisasi dan dalam rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut.

## METODE PENELITIAN

### *Ruang Lingkup dan Pendekatan Penelitian*

Ruang lingkup penelitian, meliputi : (1) identifikasi lokasi dan responden yang akan dipilih; (2) aplikasi dari teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer; (3) evaluasi semua permasalahan dikaitkan dengan data sekunder; dan (4) analisa secara komprehensif mengenai pemecahannya.

Pendekatan dalam penelitian menggunakan kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan komponen *stake holders*, : (1) TKI; (2) Pemerintah (dinas terkait); (3) PJTKI; (4) Calo. Hasil akhirnya, diperoleh data berkaitan dengan peran Pemerintah dalam merancang, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan TKI ke LN.

### *Definisi Operasional*

Pengelolaan adalah keseluruhan aktivitas didalam manajemen dalam hal mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja agar berfungsi maksimal TKI adalah aset SDM berupa tenaga kerja yang potensinya dapat dimaksimalkan di LN untuk perolehan devisa maupun pendapatan personal.

Keputusan bermigrasi adalah keputusan untuk bekerja di LN dengan variabel *dummy*-nya (nilai 1, jika bermigrasi dan 0, jika tidak bermigrasi). Umur adalah umur responden dihitung pada saat penelitian ini dilakukan.

Pendidikan adalah pendidikan formal yang pernah dicapai oleh responden, pengukuran yaitu : (1) tamat SD, (2) SMP, (3) SMA, (4) D3 dan (5) S1.

Pendapatan adalah total semua penghasilan dan mencari nafkah seseorang yang diperoleh dari bekerja, yang diukur dengan satuan rupiah. Tingkat pengetahuan adalah pemahaman terhadap migrasi yang tercermin dari pengetahuan tentang migrasi ke LN

Banyaknya informasi adalah jumlah informasi yang diterima responden

Faktor pendorong adalah alasan yang menderong untuk menjadi TKI

Faktor penarik adalah alasan yang menyebabkan tertarik menjadi TKI

Permintaan TKI adalah jumlah TKI yang diminta oleh pengguna jasa tenaga kerja baik perusahaan maupun rumah tangga dengan spesifikasi tertentu

Penawaran TKI adalah jumlah TKI yang mampu ditawarkan oleh pegerah tenaga kerja (melalui koordinasi pemerintah dan swasta)

#### *Populasi dan Sampel*

Populasi penelitian ini adalah mantan TKI dan calon TKI serta anggota keluarganya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penentuan sampel lokasi penelitian dilakukan secara proporsional *purposive random sampling*, meliputi daerah yang mengirimkan TKI terbanyak didasarkan dari data Disnaker propinsi Jawa Timur.

Sampel responden dipilih secara *purposive random sampling*, dengan teknik *snowball*, yakni sebanyak 150 orang dengan rincian 117 responden yang memutuskan bekerja ke LN (terdiri dari mantan TKI dan calon TKI) dan 33 responden yang memutuskan tidak bekerja ke LN.

#### **Teknik dan Instrumen dalam Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, yakni : observasi terlibat, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Instrumen dalam penelitian adalah kuisisioner dan pedoman wawancara. Kuisisioner digunakan untuk mengeksplorasi data dari responden TKI di empat Kabupaten. Pedoman wawancara diaplikasikan untuk mengeksplorasi data dari instansi pemerintah dan PJTKI.

#### *Analisis Data*

Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan bantuan analisis model logit untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan TKI bekerja ke LN. Metode yang digunakan untuk menganalisis fungsi penawaran dalam tata niaga jasa TKI adalah analisis keseimbangan pasar. Selanjutnya, untuk

mengetahui kondisi saluran distribusi TKI digunakan Analisis S-C-P (Structure-Conduct-Performance).

## PEMBAHASAN

### *Potret TKI Asal Jawa Timur*

TKI dikatakan legal apabila berangkat dengan tata cara dan kelengkapan yang telah ditentukan, melalui PJTKI yang terdaftar, serta menggunakan visa kerja dan paspor. Sedangkan, TKI dikatakan ilegal karena tidak melakukan pelaporan secara resmi. Data Disnaker Jatim 2003 menunjukkan kenaikan TKI legal hingga tahun 2002 yakni dari 36.485 orang menjadi 41.768 orang, sedangkan TKI ilegal sulit untuk diperkirakan jumlahnya.

Tabel 1. Penempatan TKI Jawa Timur Menurut Negara Tujuan

| No           | Negara Tujuan     | 2000   |        | 2001   |        | 2002   |        |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              |                   | L      | P      | L      | P      | L      | P      |
| 1.           | Arab Saudi        | 92     | 3.819  | 16     | 510    | 19     | 102    |
| 2.           | Malaysia          | 2.907  | 6.124  | 2.131  | 5.874  | 5.602  | 5.436  |
| 3.           | Singapura         | 62     | 6.816  | 8      | 3.664  | 0      | 3.650  |
| 4.           | Hongkong          | 115    | 12.889 | 2      | 14.684 | 0      | 13.555 |
| 5.           | Taiwan            | 131    | 6.187  | 62     | 4.769  | 239    | 6.365  |
| 6.           | Brunei Darussalam | 58     | 2      | 1.768  | 4.263  | 2.584  | 5.034  |
| 7.           | Uni Emirat Arab   | 0      | 215    | 3      | 111    | 9      | 141    |
| 8.           | Korea             | 58     | 12     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9.           | Cyprus            | 0      | 0      | 0      | 8      | 0      | 23     |
| 10.          | Jepang            | 0      | 0      | 11     | 4      | 8      | 1      |
| <b>Total</b> |                   | 3.421  | 33.064 | 4.001  | 33.887 | 8.461  | 33.307 |
|              |                   | 36.485 |        | 37.888 |        | 41.768 |        |

Sumber: Disnaker Jatim, 2003

Tabel 1 menunjukkan bahwa Hongkong dan Malaysia menjadi negara tujuan yang mampu menampung TKW cukup besar meski dari tahun 2000 hingga 2001 mengalami penurunan. Khusus di negara tujuan Malaysia, kasus deportasi yang puncaknya terjadi di awal tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2003 tampaknya belum mempengaruhi minat TKI untuk bekerja ke LN secara keseluruhan.

### *Karakteristik Responden*

TKI yang dianalisis sebanyak 117 responden dari total 150 responden, karena sisanya yakni 33 responden memutuskan tidak bekerja ke LN.

- TKI mayoritas berusia muda (antara 21 - 25 tahun) yakni sekitar 38,45%
- Status dalam keluarga responden mayoritas sebagai anak (58,97 %)
- Pendidikan, mayoritas setingkat SLTA yakni sekitar 52,14%

- TKW, yang menjadi pembantu rumah tangga mayoritas berbekal ketrampilan memasak (56,66%)
- TKI laki-laki mayoritas tidak mempunyai ketrampilan (52,14%)
- Pengalaman pekerjaan sebelum menjadi TKI mayoritas buruh (52,14%).
- Pihak yang mendorong menjadi TKI mayoritas dari diri sendiri (79,49 persen)
- Faktor pendorong utama : sempitnya lapangan kerja (63,25 persen)
- Faktor penarik utama : harapan mendapatkan pekerjaan 45,30 persen

#### Hasil Perhitungan dan Interpretasi dari Analisis Model Logit

Tabel 2. Hasil Analisis Model Logit Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Seseorang Bekerja di Luar Negeri

| Variable Independen | Koefisien Regresi | Wald   | Df | Signifikan | Exp(B) |
|---------------------|-------------------|--------|----|------------|--------|
| Konstanta           | 23,345            | 24,448 | 1  | 0,000      | -      |
| Umur                | -0,271            | 9,949  | 1  | 0,002      | 0,782  |
| Pendidikan          | -3,464            | 17,189 | 1  | 0,000      | 0,031  |
| Pendapatan          | 0,000             | 3,751  | 1  | 0,053      | 1,000  |
| Pengetahuan         | -0,268            | 0,364  | 1  | 0,547      | 0,766  |
| Informasi           | -1,833            | 14,830 | 1  | 0,000      | 0,160  |
| Faktor pendorong    | 0,949             | 1,316  | 1  | 0,251      | 2,583  |
| Faktor penarik      | -0,576            | 1,398  | 1  | 0,237      | 0,562  |

Chi-Square ( $\chi^2$ ) : 15,084      Significance : 0,237  
 -2 Log Likelihood : 158,072 (Block 0)      91,387 (Block 1)  
 Goodness of fit : 98,3

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Rel.10

Tarif kepercayaan : 95%

Berdasar tabel 2, nilai  $\chi^2 = 15,084$  yang berarti  $H_0 =$  ditolak sehingga model dapat diterima karena dapat menjelaskan hubungan fungsional variabel independen dan dependen dengan nilai *Goodness of fit* sebesar 98,3. Interpretasi variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan migrasi adalah :

- o Nilai signifikan menunjukkan bahwa umur, pendidikan, dan informasi berpengaruh tidak nyata terhadap keputusan migrasi ke LN dengan (nilai *significance* < 0,05). Sebaliknya, pendapatan, pengetahuan, faktor pendorong dan penarik mempengaruhi secara nyata (nilai signifikansi > 0,05). Hal ini disebabkan oleh besarnya desakan ekonomi di DN dan besarnya harapan di LN.
- o Nilai *odds ratio* (Exp (B)) dari tabel 2 menunjukkan hanya pendidikan yang mengalami penurunan rasio perubahan keputusan sebesar 0,031, hal ini disebabkan responden semakin tahu resiko bekerja di LN. Sebaliknya, faktor lainnya menunjukkan kenaikan rasio yang disebabkan oleh desakan ekonomi di DN.



*Eksistensi dari Tata Niaga TKI di Jawa Timur*

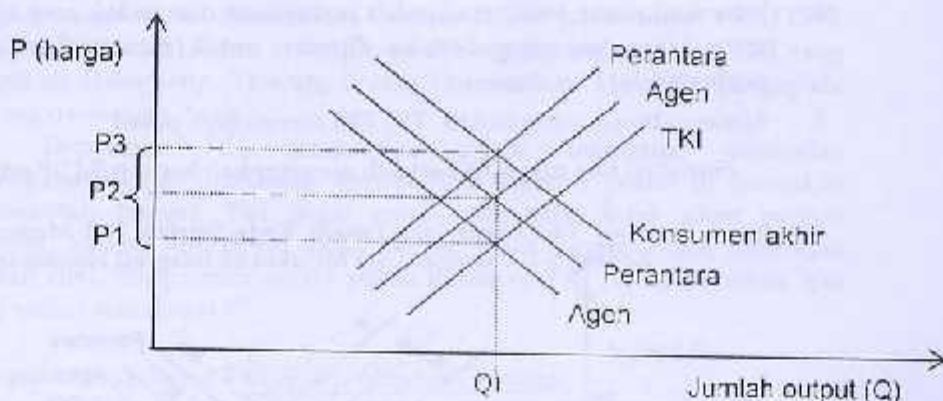
Pelaku dari tata niaga TKI utamanya terdiri atas : TKI, pelaku perantara (agen di DN yaitu PJTKI, agen di LN dan calo), dan users akhir (perusahaan dan rumah tangga), dengan mengikuti pola sebagai berikut :

1. Pola I (TKI, agen perantara di DN (PJTKI), agen di LN, users akhir).
2. Pola II (TKI, calo, agen di DN (PJTKI), agen di LN, users akhir)
3. Pola III (TKI, calo di DN, calo di LN, users akhir)

*Selisih Tata Niaga*

Selisih tata niaga (*marketing margin*) ialah selisih harga jual perantara kepada konsumen akhir dengan harga jual yang diterima produsen (Ningsih, 2000). Pelaku tata niaga TKI, terdiri : TKI (penawaran primer), perantara (permintaan dan penawaran turunan), dan konsumen akhir (permintaan primer).

Gambar 1. Selisih Tata Niaga Jasa Tenaga Kerja



Berdasar gambar 1, selisih tata niaga yang besar muncul karena adanya perantara, yakni semakin panjang saluran tata niaga menyebabkan harga jual TKI semakin rendah atau harga yang dibayar konsumen akhir semakin tinggi. Selisih tata niaga terdiri dari dua komponen yaitu biaya tata niaga dan laba perantara. Selisih tata niaga dapat ditekan dengan cara memperpendek saluran tata niaga atau meningkatkan posisi tawar TKI.

Lemahnya posisi tawar di tingkat TKI disebabkan : (1) TKI (penjual) jasa menghadapi kondisi pasar yang *oligopsomi*, yakni jumlah TKI (penjual) > jumlah perantara (pembeli); (2) kualitas TKI secara individu yang relatif rendah; (3) kemampuan biaya yang dimiliki TKI masih kurang memadai; (4) banyak TKI terikat kontrak dengan perantara baik calo maupun agen, terutama disebabkan masalah hutang piutang (berangkat tanpa bayar).

### Penerapan Konsep S-C-P

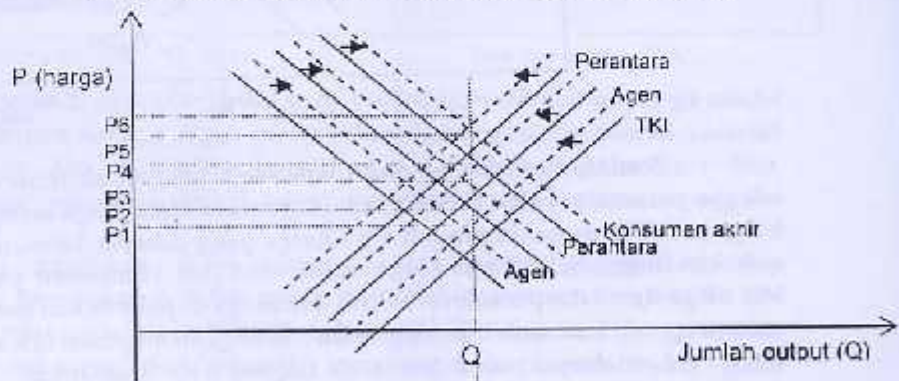
Teknik untuk menciptakan tata niaga yang efisien menurut Tomek (1972) adalah dengan menerapkan konsep S-C-P (*structure-conduct-performance*).

Implementasinya dalam tata niaga TKI, sebagai berikut :

1. Struktur pasar, yang dihadapi TKI (produsen) dengan PJTKI (pembeli) adalah oligosopni, yaitu jumlah TKI > jumlah PJTKI, sehingga daya tawar PJTKI dalam penentuan harga jauh lebih besar daripada TKI.
2. Saluran tata niaga, semakin panjang saluran tata niaga, maka semakin besar biaya tata niaga dan laba yang dinikmati oleh lembaga perantara.
3. Ciri-ciri khusus dari jasa yang akan dijual, harus diperhatikan TKI bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar TKI dalam penentuan harga
4. Informasi pasar, terutama jumlah permintaan dan penawaran agregat serta harga jual yang berlaku dipasar, untuk menentukan waktu penjualan
5. Efisiensi biaya, yang efektif TKI TKI menempuh pola I.

Simulasi tata niaga TKI setelah menerapkan konsep S-C-P adalah :

Gambar 2. Simulasi Tata Niaga Jasa Tenaga Kerja Setelah TKI Menerapkan Konsep S-C-P dengan Cara Melakukan Integrasi Horizontal



Berdasar gambar 2, faktor utama yang mempengaruhi posisi tawar TKI (penjual) dalam penentuan harga jual adalah kemampuan biaya dan banyaknya informasi. TKI umumnya dihadapkan pada kendala, yakni tidak mempunyai cukup biaya untuk meningkatkan kemampuannya dan rendahnya informasi tentang kerja di LN menyebabkan rawan terjadi penipuan. Hal tersebut memberikan perubahan jumlah penawaran

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan lebih kecil daripada perubahan harga (inelastis).

TKI harus mempunyai kredibilitas yang lebih tinggi, terutama saat berhadapan dengan perantara maupun konsumen akhir. Karena itu, dalam konsep S-C-P, TKI dianjurkan untuk melakukan tata niaga secara kolektif (asosiasi) dan terorganisasi dengan cara melakukan integrasi horizontal. Keuntungannya : (1) biaya tata niaga per unit dapat ditekan (skala ekonomis); (2) resiko tata niaga akibat fluktuasi harga dapat dikurangi, karena dengan kekuatan pasar yang lebih besar memungkinkan TKI untuk dapat mempengaruhi harga jual (*price maker*); (3) TKI dapat menekan laba perantara dengan memperpendek saluran tata niaga. Dengan demikian, harga dapat terjangkau oleh konsumen akhir dan sekaligus tidak merugikan TKI.

#### *Implikasi dari Eksistensi TKI : Devisa Versus Deportasi*

Data Disnakertrans Jatim pada semester I (Januari-2002), devisa dari TKI asal Jatim lebih dari 83 juta US \$ (dengan perhitungan kurs Rp. 754,2 M pada kurs Rp. 9000/dolar). Pada tahun 2001, devisa menembus 1599,1 juta dolar AS. Pemasukan terbesar terjadi pada tahun 1998/1999, yakni lebih dari 281,8 juta dolar. Transfer uang kebanyakan dari TKI yang bekerja di Hongkong, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan negara-negara Arab.<sup>3</sup>

Deportasi TKI tampaknya selalu mewarnai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan laporan posko di Nunukan (Kalimantan Timur), TKI ilegal yang dideportasi tidak akan pernah berhenti, karena jumlahnya tidak hanya 50.000 orang tetapi mencapai ratusan ribu. Pengusiran secara paksa terhadap TKI bisa dihentikan jika MoU sudah terealisasi.<sup>4</sup>

#### *Manajemen Pengelolaan TKI Terkait Masalah Deportasi*

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Jawa Timur terkait deportasi :

- a. Memfasilitasi TKI ilegal yang dideportasi dengan menyiapkan Satgas dan upaya pemulangan ke daerah asal.
- b. Pemberian dana *crash program*<sup>5</sup>
- c. Pemberian fasilitas kredit bagi TKI ilegal yang ingin kembali ke LN<sup>6</sup>
- d. Memperjuangkan nasib TKI agar dapat kembali berangkat ke LN

<sup>3</sup> Kompas, 08-11-2002, Meski Pemerintah Melarang, Kediri tetap Berangkatkan TKI ke Malaysia

<sup>4</sup> Ulasan dari Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi), Wahyu Susilo dimuat di Kompas, 5-3-2003. "Pemerintah Indonesia Bantah Malaysia Deportasi TKI Ilegal"

<sup>5</sup> D-Infokom Jatim, "Pemprop Jatim Beri Bantuan TKI Ilegal Ex-Malaysia" (didown load : 04-04-2004)

<sup>6</sup> Kompas, 14-12-2001. "TKI- Disiapkan Kredit Rp.130 M bagi TKI"

Urgensi kebijakan yang seharusnya segera dilakukan pemerintah adalah :

- a. Penerapan *on-line system* di tingkat propinsi
- b. Penelitian ulang terhadap PJTKI
- c. Mengupayakan terbentuknya asosiasi/serikat TKI di daerah
- d. Pengiriman TKI dengan sistem jatah :
- e. Pembentukan *joint committee* dan *crisis center*
- f. Pengiriman TKI dengan kesepakatan G to G

Upaya untuk mengurangi TKI ilegal menjadi legal adalah :

- a. Peraturan yang menjamin perlindungan TKI
- b. Memberikan dokumen dan surat resmi kepada TKI
- c. Menyebarkan informasi kepada TKI secara benar
- d. Meningkatkan kualitas TKI sehingga mempunyai daya tawar
- e. Advokasi dalam penyelesaian masalah TKI
- f. Menindak tegas PJTKI bermasalah dan praktek calo di semua lini birokrasi
- g. Mengupayakan asosiasi/serikat TKI
- h. Transparansi biaya, prosedur maupun upah kepada TKI.

#### Model Alternatif dalam Pengelolaan TKI

##### Model Sistem Kelembagaan TKI

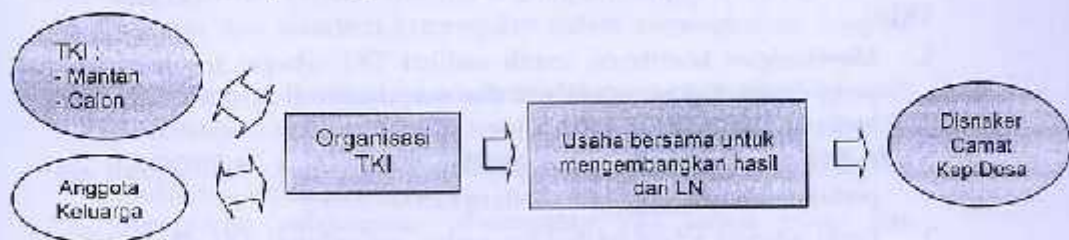
Gambar 3.3. Sistem Kelembagaan TKI



Secara kelembagaan dalam pengelolaan TKI, proses perolehan *job order* (JO), perekrutan dan pemberangkatan TKI bisa dilakukan oleh PJTKI. Proses pelatihan dan pembekalan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, lembaga pengontrol (LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi TKI) dalam hal ini memonitoring proses awal perekrutan sampai pengiriman baik terhadap PJTKI dan pemerintah.

Model Organisasi TKI dan Pengembangan Usaha Bersama

Gambar 3.4. Model Pengembangan Usaha Bersama (Syafaat, 2002)

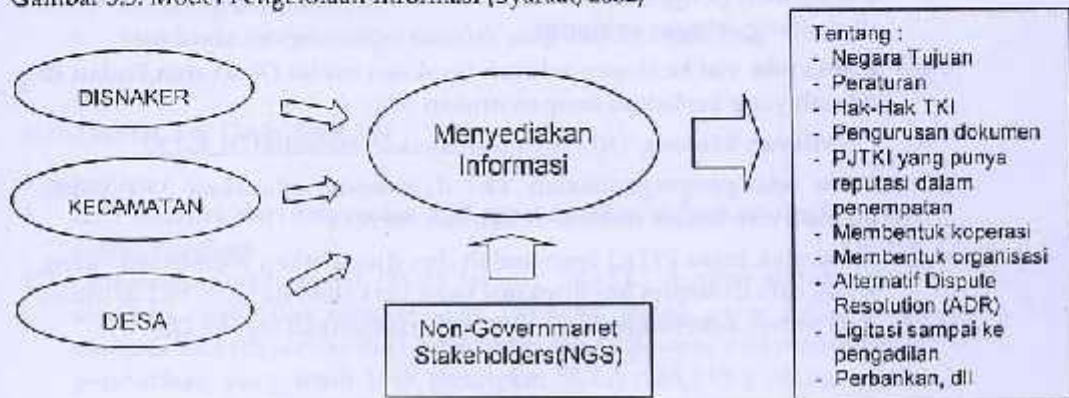


Organisasi atau asosiasi yang diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi TKI beserta anggota keluarganya bias berwujud koperasi dengan diversifikasi usaha sesuai kemampuan mantan TKI (jika benar-benar tidak ingin kembali lagi bekerja ke LN). Tujuannya untuk mengkomodasikan hasil TKI agar selepas dari LN tidak bingung untuk mencari pekerjaan lagi.

Model Pengelolaan Informasi

Pengelolaan informasi berkaitan dengan penempatan TKI LN, baik secara nasional maupun lokal masih memuat banyak kelemahan, seperti : tidak transparannya mekanisme maupun biaya dari calon TKI, penyelesaian masalah atau kasus yang dialami baik ketika berada di DN maupun di LN.

Gambar 3.5. Model Pengelolaan Informasi (Syafaat, 2002)



Pihak dari *stakeholders* (Disnaker, Kecamatan dan Desa) harus menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya agar calon TKI tidak sampai jatuh ke dalam rayuan para calo. *Non-Government Stakeholders* (NCS) yakni LSM, kalangan kampus, asosiasi TKI atau pemerhati masalah TKI harus diberdayakan dalam menyediakan informasi yang terarah bagi TKI (Syafaat, 2002)

### Analisis Peran Stakeholders dalam Pengelolaan TKI ke LN

Beberapa hal penting yang dapat dirumuskan dalam pengelolaan

TKI :

1. Membangun komitmen untuk melihat TKI sebagai sosok manusia yang diperlakukan secara adil dan manusiawi. Jadi, perlu komitmen bersama bagi seluruh stakeholders dengan melihat eksistensi TKI
2. Pelabelan negatif terutama terhadap TKW supaya dihilangkan agar perlakuan buruk juga bisa dihilangkan
3. Perlu adanya advokasi hukum untuk melindungi TKI. Oleh karena itu, kita sepakat mendesak pemerintah pusat supaya segera membahas RUU Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya
4. Perlu dibentuk asosiasi/wadah/organisasi bagi TKI dan anggota keluarganya
5. Perlu adanya proses penyadaran hukum tentang hak-hak TKI yang dilakukan pemerintah, LSM dan PJTKI
6. Pemerintah daerah harus mengambil prakarsa yang lebih cepat untuk melindungi TKI dengan mengeluarkan Perda tentang perlindungan TKI
7. Pemerintah daerah harus tegas untuk menutup PJTKI yang melanggar ketentuan merekrut TKI sebelum ada *Job Order*
8. Perlu kebersamaan *stakeholders* dan semua yang mempunyai komitmen terhadap pembelaan TKI untuk memperbaiki sistem manajemen pengelolaan TKI lebih humanis karena selama ini masih dipandang sebagai komoditi
9. Harus ada visi ke depan seluruh birokrasi mulai Dinas dan Badan di daerah yang berkaitan dengan urusan TKI
10. Di wilayah kantong TKI harus diupayakan memiliki BLK-LN
11. Perlu ada pengorganisasian TKI dan memberdayakan TKI untuk mampu dan berani menuntut hak-hak mereka
12. Menindak tegas PJTKI bermasalah dan diupayakan membatasi ruang gerak calo di semua lini birokrasi yang berkaitan dengan TKI di mulai dari proses keberangkatan ke LN sampai kembali lagi ke DN.

#### *Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya*

Pihak yang harus ikut memberikan perlindungan kepada TKI, yakni :

##### **1. Pemerintah :**

1. Membuat peraturan yang menjamin perlindungan TKI;
2. Memberikan dokumen dan surat-surat yang diperlukan TKI secara benar sesuai dengan kondisi TKI;

3. Menyebarluaskan informasi tentang kerja ke LN yang jelas dan lengkap;
4. Melatih dan memberi ketrampilan dalam meningkatkan kualitas TKI;
5. Memberikan fasilitasi pembelaan dalam penyelesaian masalah TKI;
6. Mengawasi pelaksanaan penempatan TKI secara benar dan menindak setiap pelanggaran;
7. Mengawasi pelaksanaan penempatan TKI secara benar dan menindak setiap pelanggaran

## 2. PJTKI

1. Melatih dan menyiapkan TKI dengan *skill*
2. Mencarikan pekerjaan yang layak bagi TKI untuk menjamin TKI
3. Menempatkan TKI yang benar-benar memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan
4. Menghargai harkat kemanusiaan TKI, tidak semata-mata berorientasikan bisnis semata;
5. Menyelesaikan permasalahan yang menimpa TKI baik di dalam dan maupun di luar negeri.

## 3. Masyarakat/Ormas

1. Berperan aktif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dalam kegiatan penempatan TKI, seperti adanya praktek penempatan TKI illegal
2. Mendorong seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap masalah TKI
3. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh TKI.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Karakteristik dari responden TKI menunjukkan cukup strategis untuk dikembangkan karena
2. umumnya masih muda (21-25 tahun : 38,45%) dengan status dalam keluarga mayoritas sebagai anak (58,97%); pihak yang mendorong menjadi TKI mayoritas dari diri sendiri (79,49 persen) dan mempunyai pendidikan yang lebih baik (setingkat SLTA : 52,14%). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dibenahi yaitu TKW, yang menjadi pembantu rumah tangga mayoritas hanya berbekal ketrampilan memasak (56,66%); TKI laki-laki mayoritas tidak mempunyai ketrampilan (52,14%); dengan pengalaman pekerjaan sebelum menjadi TKI mayoritas buruh (52,14%).
3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan TKI bekerja di LN didasarkan pada hasil perhitungan logistik regresi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendapatan dan pengetahuan berpengaruh nyata terhadap keputusan TKI bekerja di LN. Alasannya, pendapatan yang layak di DN dan pengetahuan yang cukup mengenai TKI di LN menyebabkan responden enggan bekerja di LN dikarenakan pertimbangan resiko baik di tempat kerja maupun keluarga yang ditinggalkannya
  - b. Faktor (umur, pendidikan, banyaknya informasi, adanya faktor pendorong dan penarik) sudah tidak dipertimbangkan atau berpengaruh tidak nyata terhadap keputusan TKI bekerja di LN, hal ini utamanya disebabkan oleh desakan ekonomi akibat kurang tersedianya lapangan kerja di DN dan keinginan untuk dapat memperbaiki kesejahteraan hidupnya.
4. Eksistensi TKI dipengaruhi oleh adanya permintaan TKI di LN dan penawaran TKI di DN. Kelebihan permintaan (*excess demand*) TKI di LN terhadap penawaran TKI berimplikasi positif pada terjadinya TKI legal karena keluasan atas kesempatan kerja. Sebaliknya, kelebihan penawaran (*excess supply*) TKI atas permintaan TKI di LN akan memicu terjadinya TKI ilegal, hal ini disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan di DN.
5. Tata niaga jasa TKI yang efisien dengan menerapkan konsep S-C-P (*structure-conduct-performance*), implementasinya sebagai berikut :
- a. Struktur pasar, yang dihadapi TKI (produsen) dengan PJTKI (pembeli) adalah oligosopni, yaitu jumlah TKI > jumlah PJTKI, sehingga daya tawar PJTKI dalam penentuan harga jauh lebih besar daripada TKI.
  - b. Saluran tata niaga, semakin panjang saluran tata niaga, maka semakin besar biaya tata niaga bagi (TKI) dan laba bagi (pelaku perantara).
  - c. Ciri-ciri khusus dari jasa TKI yang akan dijual (terutama pemberian bekal ketrampilan, waktu penjualan dan jaminan perlindungan) harus diperhatikan bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar TKI
  - d. Informasi pasar, terutama jumlah permintaan dan penawaran agregat serta harga jual dipasar untuk menentukan waktu penjualan jasa TKI
  - e. Efisiensi biaya, saluran tata niaga TKI pola I dianggap paling pendek saluran distribusinya.
6. Implikasi dari eksistensi TKI bagi pembangunan di Jawa Timur adalah : positif, karena dapat mengurangi pengangguran, dan memberikan kontribusi dalam perolehan devisa bagi pemerintah dari remitan yang dikirim TKI. Sebaliknya, berimplikasi negatif karena sampai saat ini persoalan deportasi terus melanda TKI.



7. Pengelolaan yang dilakukan Pemerintah dan Swasta (PJTKI) dalam pengelolaan TKI terkait adanya deportasi TKI adalah pengelolaan yang berbasis kepada perlindungan TKI dan anggota keluarganya mulai proses perekrutan, pembekalan, pemberangkatan dan saat kepulangan TKI. Kebijakan pemerintah diutamakan pada penanganan yang telah dilakukan, urgensi kebijakan yang harus segera dilakukan dan upaya untuk mengurangi TKI ilegal menjadi legal. Alternatif model pengelolaan TKI adalah dengan :
  - a. Penataan kembali sistem kelembagaan yang terkait dengan TKI
  - b. Mengakomodasi TKI secara integrasi horizontal dalam bentuk asosiasi (organisasi), utamanya ke arah pengembangan usaha bersama
  - c. Pengelolaan informasi yang lebih baik bagi TKI dan anggota keluarganya

#### Saran

1. Faktor yang tidak dipertimbangkan atas keputusan TKI bekerja di LN utamanya dipengaruhi oleh alasan ekonomi, karena itu pemerintah harus segera memecahkan permasalahan ketenagakerjaan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di DN, dan TKI di LN tetap dikelola dengan basis perlindungan, bukan orientasi profit belaka.
2. PJTKI telah mempunyai asosiasi yakni APJATI (Asosiasi Perusahaan Pengerah Jasa TKI), tetapi kenapa TKI belum? Oleh karena itu, TKI harus secara sadar dan kolektif melakukan integrasi horizontal dengan segera membentuk asosiasi (organisasi) untuk TKI dan anggota keluarganya

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2001. *TKI -Disiapkan Kredit Rp130 Milyar bagi TKI*. Kompas (1-11-2001). di download di [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 15-3-2004
- , 2002. *Persoalan TKI, Persoalan Jawa Timur*. Kompas (4-2-2002). di download di [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 25-3-2004
- , 2002. *Pemprop Jatim Beri Bantuan TKI Ilegal Ex-Malaysia*. D-Infokom Jatim. (11-8-2002).
- , 2002. *TKI Meski Pemerintah Melarang, Keatri Tetap Berangkatkan TKI ke Malaysia*. Kompas (8-11-2002) di download di [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 15-3-2004
- , 2002. *Pemprop Jawa Timur Beri Bantuan TKI Ilegal ex Malaysia*. Kompas (11-8-2002). didownload di [www.kompas.com](http://www.kompas.com) . 15-3-2004
- , 2003. *Pemerintah Indonesia Bantah Malaysia Deportasi TKI Ilegal* Kompas (5-3-2003). di download di [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 15-3-2004
- , 2003. *Malaysia Siap Deportasi 50.600 TKI Ilegal*. Kompas (3-2-2003) di download di [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 15-03-2004
- , 2003. *Data Penempatan TKI ke LN Tahun 2002*. Dishaker Jawa Timur
- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UI - Press. Jakarta
- Keban, Yermias T. 1994. *Studi Niat Bermigrasi di Tiga Kota : Determinan dan Intervensi*. Prisma No.7. LP3ES. Jakarta
- Ningsih, E.S. 2000. *Analisis Tata Niaga Komoditi Padi dalam Meningkatkan Harga Jual di Tingkat Petani Produsen (Studi Kasus di Desa Purwasari - Kec. Wonosari. Kab. Magelang)*. Skripsi. Fak. Ekonomi. Universitas Brawijaya, Malang
- Syafaat, R. 2002. *Menggagas Kebijakan Pro TKI : Rekomendasi Kebijakan Perlindungan TKI Luar Negeri di Kabupaten Blitar*. Kerjasama : Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (Fakultas Hukum - Unibraw) - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Blitar - Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Tomek, W.G, et al. 1990. *Agricultural Product Prices*. USA. Cornell University